

ABSTRAK

Muhammad Vachri Fauzan : “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung*”.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan pada Pasal 114 menegaskan orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantar dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun). Namun, pada kenyataannya Peredaran Narkotika di Kota Bandung berdasarkan data dari Polrestabes Bandung dalam kurung waktu Tahun 2017-2022 mengalami peningkatan. Hal ini karena adanya kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjalankan bisnis narkotika.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum narkotika oleh Polrestabes Bandung, kendala-kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Bandung, dalam menangani peredaran narkotika dan upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung, dalam mengatasi kendala dalam menangani peredaran narkotika .

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: Metode yang digunakan adalah *deskriptif analitis* dengan pendekatan *yuridis normatif*. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polrestabes Bandung dihubungkan dengan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diterapkan terhadap pengedar, perantara (kurir) maupun terhadap pembeli (pemakai) oleh penyidik Satresnarkoba Polrestabes Bandung, padahal penerapan pasal 114 tersebut kurang tepat apabila diterapkan terhadap pembeli (pemakai) sebagaimana tujuan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa tujuan dibuatnya Undang-undang tersebut secara khusus menyatakan pengedar diberantas, sedangkan penyalah guna dijamin mendapatkan upaya rehabilitasi. Kendala yang dihadapi oleh Satresnarkoba Polrestabes Bandung dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polrestabes Bandung, yaitu: kurangnya personel penyidik tindak pidana narkotika, kurangnya anggaran penyidikan, masih banyaknya anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba, dan luasnya wilayah kota Bandung serta padatnya penduduk kota Bandung. Upaya yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polrestabes Bandung dalam mengatasi kendala, yaitu menambah personel untuk penyidik dan mendayagunakan penyelidik menjadi penyidik, memanfaatkan anggaran penyidikan seefisien mungkin dan mengajukan usulan dana hibah kepada instansi yang peduli dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, menindak tegas anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba dengan hukuman yang lebih berat, baik pidana maupun kode etik Polri, dan untuk mengatasi luas wilayah dan padatnya kota Bandung dalam penyelidikan tindak pidana narkotika yaitu dengan memanfaatkan ceptu) di setiap kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung.

Kata Kunci : Polrestabes Bandung, Narkotika, Penegakan hukum Narkotika